

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I PENDAHULUAN	1 - 3
BAB II KETAHANAN NASIONAL	4
BAB III SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR INDUSTRI	4 - 5
BAB IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN PENINGKATAN KEHIDUPAN	5 - 7
BAB V EKONOMI PEDESAAN	7 - 8
BAB VI AGROINDUSTRI PEDESAAN	9 - 12
BAB VII MITRA USAHA	12 - 15
BAB VIII BUMN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DAN KEMITRAANNYA	15 - 22
BAB IX PEMBINAAN EKONOMI LEMAH DAN KOPERASI	23 - 29

I. Pendahuluan :

Karya tulis ini berjudul " Langkah-Langkah Operasional Pengembangan Agroindustri dalam Pembangunan Ekonomi " Langkah - langkah operasional pengembangan agroindustri dalam pengembangan ekonomi harus ditelaah dari pelaksanaan yang menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial- budaya dan keamanan yang kesemuanya membentuk ketahanan-nasional. Sejauh ini dirasakan bidang ekonomi pembangunannya dirasakan masih ketinggalan, lebih-lebih dipedesaan dibandingkan dengan tiga bidang lainnya.

Sesuai dengan G.B.H.N. tahun 1988, langkah-langkah operasional pengembangan agroindustri harus sesuai dengan arah pembangunan ekonomi, yaitu menumbuhkan industri yang kuat didukung oleh sektor pertanian yang maju, efisien dan tangguh.

Sektor pertanian yang tangguh, dibentuk oleh petani - petani yang tangguh, yang dapat memanfaatkan sumber daya dan peningkatan kehidupannya, sehingga perlu dibina :

bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia. Mengingat sumber daya - sumber daya itu ada diwilayah pedesaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kehidupan rakyat pedesaan untuk meningkatkan perekonomian pedesaan perlu ditata pewujudan Trimatra pembangunan pertanian : Wilayah - Terpadu, Komoditas- Terpadu dan Usaha Tani - Terpadu.

Agroindustri dipedesaan menuju keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri yang dilaksanakan secara bertahap dan diarahkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi para petani, meningkatkan kesempatan kerja yang berarti meningkatkan pendapatan rakyat pedesaan.

Untuk membentuk agroindustri dipedesaan diperlukan penunjang berupa bantuan mengenai penelitian, pengembangan teknologi, deversifikasi produk, langkah - langkah efisiensi dan peningkatan produktivitas, rancang - bangun, perbaikan mutu, bantuan permodalan, P.P.L, peningkatkan pengetahuan / keterampilan, mitra usaha dan / atau bapak - angkat.

Pelaku yang berperan dalam melakukan langkah - langkah pelaksanaan pengembangan (a.l.agroindustri) dalam pembangunan ekonomi ini adalah tiga pelaku ekonomi yaitu : Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta, yang dalam kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang - Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam langkah - langkahnya ketiga pelaku ekonomi itu mencegah persaingan yang tidak sehat, harus mewujudkan kerja sama yang serasi dan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.

Peran dan fungsi masing-masing pelaku ekonomi itu perlu "dikoordinasi" dalam langkah - langkah pengembangan pembangunan ekonomi Petani, pengrajin yang "terhimpun dalam Koperasi / KUD. Pada saat ini ada yang mengadakan kerja sama dan atau bantuan dari BUMN, baik sebagai mitra usaha, maupun sebagai anak angkat BUMN dalam rangka pelaksanaan bantuan ekonomi lemah dan koperasi.

Langkah - langkah operasional pengembangan agroindustri, telah banyak dilakukan oleh ketiga pelaku ekonomi, sedangkan kemitraan dan bantuan pada ekonomi lemah dan koperasi pada umumnya telah dilakukan oleh BUMN.

BUMN sub sektor perkebunan telah lama mengembangkan agroindustri sekaligus tercakup mengenai pengembangan pembangunan politik, sosial budaya dan keamanan, antara lain melalui pola PIR - BUN, berdasarkan kemitraan bapak angkat - anak angkat / bapak kandung - anak kandung, saling membutuhkan dan menguntungkan.

~~Dalam karya tulis ini disajikan beberapa contoh yang~~
menyangkut kerja - sama usaha, kemitraan - usaha dalam bentuk anak angkat - bapak angkat.

Semoga karya tulis yang sederhana ini bermanfaat.

" Sektor pertanian hanya tumbuh dengan 1.3 % karena adanya keringanan. "

Sehubungan pertumbuhan tersebut, dalam rangka meningkatkan pembangunan, perlu diciptakan pertanian yang tangguh, yang merupakan wahana dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana kita harus :

1. Mampu mempaatkan segala sumber daya secara optimal.
2. Mampu menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan tantangan.
3. Mampu mengadakan penyesuaian pola struktur produksi untuk menyesuaikan dan mengimbangi perubahan permintaan pasar dan perubahan teknologi.
4. Mampu berpartisipasi, integrasi positif dalam pembangunan wilayah/desa dalam rangka peningkatan perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta perbaikan ketarpaduan lingkungan hidup.

IV. Pemanfaatan Sumber daya dan Peningkatan Kehidupan :

Sejauh mana kita dapat merubah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang atau kelompok atau suatu wilayah yang tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan sumber

daya ataupun mengembangkan sumber daya dan meningkatkan kehidupannya.

Tidak dapat meningkatkan diri yang menyangkut lahir dan bathin, tidak mampu meningkatkan dan mengembangkan diri yang ada hubungannya dengan peningkatan produktivitas.

Dalam rangka meningkatkan kehidupan mereka diperlukan suatu arah ke arah :

1. pertumbuhan ekonomi yang tinggi
2. pemerataan
3. peningkatan lapangan kerja
4. peningkatan pendapatan
5. peningkatan pelayanan
6. pengembangan kelembagaan



Dalam rangka pembinaan petani/rakyat, perlu dilaksanakan Tribina :

1. bina lingkungan
2. bina usaha
3. bina manusia (asih, asah, asuh)

Pembinaan yang secara terus menerus dan konsisten.

Fersoalannya adalah bagaimana agar pembinaan itu lebih efektif.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya dan lingkungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan

ekonomi terutama ekonomi pedesaan.

Sebagian besar Rakyat Indonesia adalah petani. Indonesia adalah negara agraris, dalam pembentukan ekonomi pedesaan, ekonomi rakyat perlu dibentuk petani-petani tangguh :

1. menguasai keterampilan dalam penerapan inovasi ekonomis, teknis dan sosial budaya.
2. dapat mengembangkan usaha - taninya.
3. mampu menghadapi resiko usaha
4. menguasai pemanfaatan azas skala ekonomi secara mandiri atau dalam kerja sama dengan petani lainnya.

V. Ekonomi pedesaan :

Produksi di pedesaan dilakukan oleh berjuta-juta orang/petani yang tersebar diseluruh pelosok kampung ditanah air dalam bentuk kegiatan / usaha kecil-kecil dengan berjenis-jenis / macam-macam komoditas, kuantitas dan kualitas.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas perlu ditata dalam rangka meningkatkan perekonomian pedesaan, dengan :

Unsur Trimarta, dengan kebijaksanaan :

1. Wilayah terpadu
2. Komoditas terpadu
3. Usaha Tani Terpadu

menuju efektivitas dan efisiensi wilayah / desa yang optimal.

Kebijaksanaan Wilayah -Terpadu, ditingkatkannya keterpaduan antar sektoral, subsektoral, pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Kebijaksanaan komoditas - Terpadu didasarkan pada skala prioritas komoditas diwilayah tersebut, mempertimbangkan keterpaduan dengan :

1. penyediaan sarana produksi
2. proses produksi
3. penanganan pasca panen
4. pengolahan/agroindustri
5. demasaran

Kebijaksanaan Usaha -Tani Terpadu diarahkan dan dibinanya para petani kearah :

1. usaha tani dalam satu kesatuan kelompok
2. dalam satu kesatuan hamparan/wilayah yang memenuhi skala ekonomi yang menguntungkan
3. keterpaduan wilayah dan komoditas dalam rangka

mencapai tingkat pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga/usaha yang layak.

VI Agroindustri di Pedesaan :

Sebagaimana dikemukakan dimuka G.E.H.N mengamanatkan, bahwa titik berat pembangunan adalah pembangunan ekonomi dengan struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh.

Struktur ekonomi yang seimbang ini akan dicapai secara bertahap, dimana didalam Pelita V ini prioritas dititik beratkan pada :

1. Sektor Pertanian :

1.1. Untuk memantapkan swasembada pangan

1.2. Meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya

2. Sektor industri :

2.1. industri yang menghasilkan komoditas ekspor

2.2. industri yang menyerap tenaga kerja

2.3. industri pengolah hasil pertanian

2.4. industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri

Pembangunan agroindustri di Pedesaan diarahkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah terutama bagi para petani penghasil bahan, meningkatkan kesempatan berusaha

serta meningkatkan kesempatan kerja.

Dalam repelita V program pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian meliputi :

1. Peningkatan pemanfaatan hasil pertanian yang ada termasuk hasil sampingan dan limbahnya berdasarkan potensi yang dimiliki dengan tetap menjaga kelestarian dan daya dukung lahan.
2. Peningkatan efesinsi, produktivitas serta penganeka ragam produk dari jenis-jenis yang telah ada, khususnya jenis-jenis industri yang menghasilkan barang-barang jadi jenis-jenis industri yang mempunyai pasar potensial serta jenis-jenis industri pengolahan hasil pertanian yang dapat mendorong perkembangan daerah.
3. Peningkatan standarisasi dan mutu produk terutama produk-produk yang mempunyai pasaran ekspor.
4. Perbaikan teknologi proses yang sudah tidak efisien yang bertujuan untuk menurunkan biaya produksi sehingga makin kompetitif dipasaran luar negeri.

Pengembangan industri tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi pedesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sederhana untuk :

1. sortasi
2. grading
3. pengawetan

4. pemerosesan

5. pengepakan

6. dan lain-lain

sehingga nilai tambah juga akan diperoleh oleh petani.

Pengembangan agroindustri di pedesaan mengalami hambatan, karena pada umumnya masyarakat di pedesaan :

1. terbatas menguasai sumber daya, termasuk kwalitasnya.
2. sebagai sumber daya manusia pada umumnya kwalitasnya rendah.
3. keterbatasan aksesibilitas terhadap kesempatan pasar/ekonomi

Memperhatikan keadaan masyarakat pedesaan pada umumnya untuk pembangunan agroindustri dipedesaan diperlukan penunjang, antara lain :

1. Bantuan dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang terkait dalam :

- 1.1. pengembangan teknologi produksi
- 1.2. diversifikasi produksi
- 1.3. efisien dan produktivitas
- 1.4. teknologi rancang -- bangunan
- 1.5. rekayasa perbaikan mutu

2. Bantuan permodalan dari Lembaga Keuangan/Kredit di pedesaan (B.P.R.) yang lunak antara lain tidak diperlukan anggunan, hanya didasarkan pada kelayakan usaha.
3. Bantuan tenaga P.P.L. yang profesional dari Departemen/Lembaga terkait.
4. Bantuan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (Balai Latihan Kerja).
5. Bantuan dari BUMN/BUMNS. sebagai mitra = usaha dan/ atau anak angkat.

VII. Mitra Usaha :

Dalam rangka meningkatkan Pembangunan Nasional, perlu ditingkatkan kerjasama antara Tiga Pelaku Ekonomi sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1987, tentang Kamar Dagang dan Industri.

Pasal 3

Kamar Dagang Industri bertujuan :

- a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang

seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional.

Pasal 7

penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan disatu pihak serta upaya mencegah persaingan yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.

Petani dalam kelompok tani, yang ada di pedesaan dalam rangka usaha - taninya perlu membentuk Rumah Tangga Usaha dan yang tepat bagi mereka adalah bentuk Usaha - Koperasi, Koperasi sebagai suku - guru ekonomi diharapkan mampu menjadi Rumah Tangga Usaha para petani yang berada di pedesaan dalam bentuk skala kecil dan sedang, dapat membantu para petani secara aktif, efektif dan efisien, baik input maupun penyaluran/pemasaran hasil produk, serta memberikan bimbingan / penyuluhan teknik dan ekonomis.

Badan Usaha Milik Swasta (B.U.M.N.S) harus berperan juga dalam pengembangan pembangunan di sektor pertanian dalam rangka upaya merangsang dan memacu pertumbuhan

agroindustri/agrobisnis.

Peran dan stabilisator pembangunan perlu ditingkatkan, selain produktivitas dan efisiensinya, juga perannya, sebagai Wahana Pembangunan / Agent Of Development dan membantu ekonomi lemah dan koperasi.

Negara kita yang terdiri dari beribu-ribu desa, merupakan negara yang makmur mempunyai sumber daya yang potensial, dalam rangka memanfaatkan sumber daya tersebut menuju industri pedesaan perlu diadakan penelitian dan pemilihan :

1. diutamakan pada daerah masyarakat berpenghasilan rendah (petani, peternak, nelayan, pengrajin dan lain-lain)
2. dalam hal pengembangan, harus lebih diutamakan bidang yang mengolah komoditas produk pertanian yang telah tersedia dalam jumlah yang cukup, continue dan berkesinambungan, yang mempunyai pasaran yang baik dalam dan atau luar negeri.
3. dalam rangka peningkatan dan penyebaran agroindustri diwilayah sentra produksi pertanian di pedesaan.

4. optimilasi pemanfaat sarana agroindustri pedesaan yang sudah ada.
5. optimilasi efesiensi dan produktivitas potensi wilayah.
6. peningkatan dan perluasan kemitraan dengan EUMN dan EUMNS.

VIII. EUMN Sub Sektor Perkebunan Dan Kemitraannya :

Untuk mengetahui pembangunan dan pengembangan sub sektor perkebunan keterkaitannya dengan ekonomi pedesaan dan kemitraan perlu diketahui fungsi dan eksistensi antara lain PT.Perkebunan (Persero).

P.T. Perkebunan mempunyai filosofi Tri Dharma Perkebunan :

1. Menghasilkan devisa maupun rupiah bagi negara dengan cara seefisien-efesiennya.
2. Memenuhi fungsi-sosial, diantaranya berupa pemeliharaan/penambahan lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia.
3. Memelihara kekayaan alam berupa pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah dan tanamannya.

Selain fungsi tersebut diatas PT.Perkebunan bertugas sebagai Agent of Development (Wahana Pembangunan antara lain PIR-EUN dan Pengabdian, pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi serta areal radius 30 km sekitar kebun PT.Perkebunan.

Pola PIR- EUN merupakan proyek perwujudan dan TRI-
MAKTA Pembangunan Pertanian, yaitu :

1. Kebijaksanaan usaha tani terpadu :

Adalah suatu kegiatan pembinaan terhadap usaha tani yang mempunyai satu cabang usaha atau beraneka ragam cabang usaha, dalam memanfaatkan secara optimal segala sumber dana dan daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan petani atau produsen lain dalam arti luas.

2. Kebijaksanaan komoditi terpadu

Yaitu suatu kegiatan pembinaan terhadap peningkatan produksi berbagai komoditi secara seimbang baik ditinjau secara vertikal mulai produksi, pengolahan sampai pemasaran. maupun secara horisontal dalam menetapkan imbangannya antara berbagai kelompok komoditi.

3. Kebijakan wilayah terpadu :

Ialah suatu kegiatan pembinaan wilayah pertanian sebagai bagian dari wilayah seutuhnya. dengan memperhatikan potensi wilayah secara seimbang, baik ditinjau dari kepentingan sektoral maupun kepentingan teritorial.

Tujuan dari PIR-BUN adalah :

1. mewujudkan usaha tani
2. menciptakan lingkungan pemukiman yang mantap
3. alih teknologi
4. merubah sikap petani, sehingga petani peserta siap menerima pemilikan dan pengolahan kebun plasma
5. membentuk wadah kerja sama yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara usaha tani petani peserta dan perusahaan inti

Pola kemitraan yang ada keterkaitan antara BUMN/BUMNS dengan KUD/Petani peserta dalam pengembangan proyek adalah :

1. Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)
2. Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)

3. Pola Intensifikasi

4. Pola Parsial

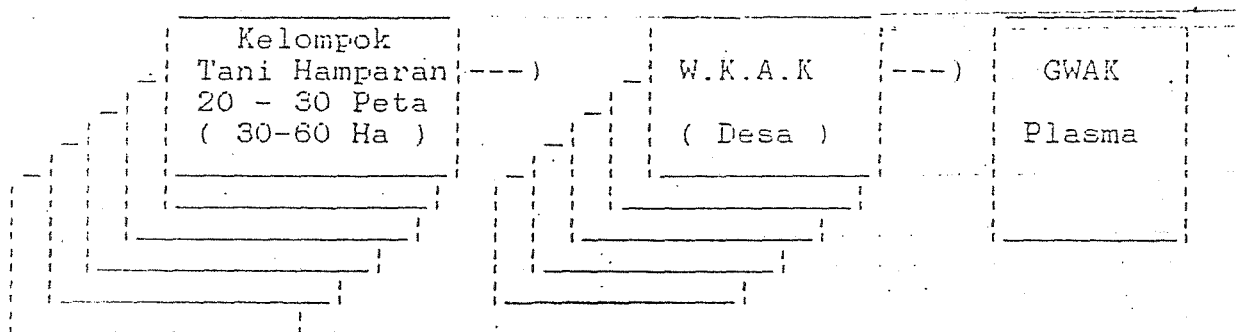
Pola PIR, dilaksanakan dalam pola :

1. PIR Swadana
 - 1.1. PIR Khusus
 - 1.2. PIR Lokal
2. PIR Berbantuan
3. PIR Transmigrasi

Sebagai gambaran kemitraan dan keterkaitan petani peserta (KUD) dengan inti di PIR-EUN yang saling membutuhkan dan menguntungkan adalah sebagai berikut :

Keterkaitan Petani di Wilayah PIR - EUN :

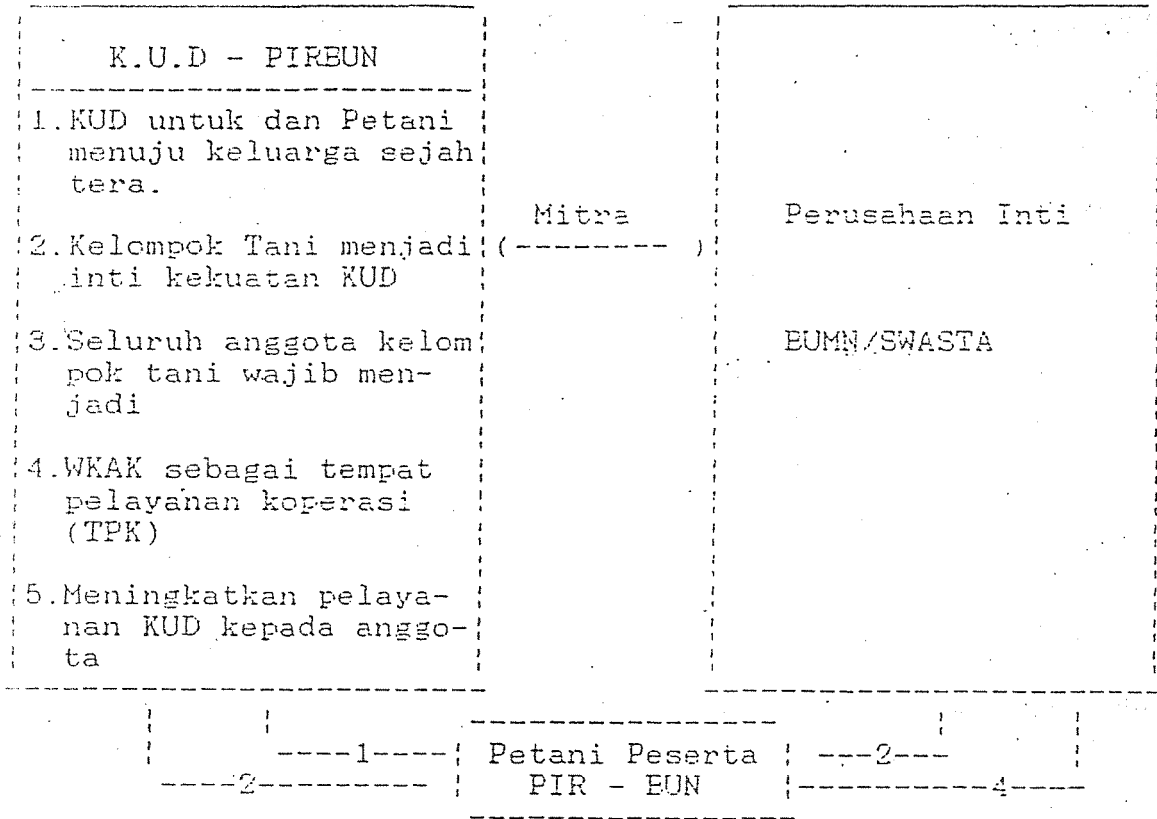
a. Sebelum KUD berdiri :



- W.K.A.K : Wadah Kerja Sama Antar Kelomppok

- G.W.K.A.K : Gabungan Wadah Kerja Sama Antara Kelompok

Wadah Perekonomian Petani dan Mitra kerja Perusahaan Inti :



- Kewajiban : sebagai anggota KUD
- Pelayanan : sarana produksi dan konsumsi
- Produksi : penjualan produksi hasil tani
- Hasil penjualan : sesuai norma dikurangi cicilan kredit

TAHAPAN : Penumbuhan kelembagaan petani wilayah

PENUMBUHAN : PIR-BUN dilaksanakan secara bertahap yang

KELEMBAGAAN : diawali sejak kedatangan calon peserta

PETANI : dilokasi pemukiman.

1. Kelompok Kerja

Calon peserta yang telah tiba dan dimukimkan dilokasi dikelompok dalam regu

regu kerja untuk melaksanakan pembangunan fisik kebun.

2. Kelompok Tani Harapan

Sesudah pengkaplingan kebun dilaksanakan dan pemilikan kebun petani telah jelas, kemudian ditumbuhkan kelompok tani berdasarkan hamparan kebun, yang terdiri dari 20-30 petani (30-60 ha kebun) tiap kelompok tani.

3. Kerjasama antar kelompok tani

Untuk melancarkan penanganan proses produksi kebun ditingkat afdeling dan untuk seluruh areal kebun plasma, selanjutnya ditumbuhkan dan dikembangkan kerjasama antar kelompok tani yaitu :

a. Wadah kerja sama antar kelompok tani yang ada dalam wilayah hamparan afdeling yang sama (UPT/Desa yang sama)

b. Gabungan wadah kerja sama antar kelompok (GWAK) yang meliputi seluruh WKAK dalam areal kebun Plasma dilokasi PIR yang bersangkutan.

Kerjasama antar kelompok tani meliputi aspek teknis maupun ekonomi petani plasma (Koperasi) sebelum KUD PIR-EUN resmi berdiri.

KUD PIR-EUN

1. KUD PIR-EUN adalah KUD yang berada di wilayah kerja PIR-EUN yang berfungsi sebagai wadah perekonomian petani mitra kerja perusahaan inti
2. Anggota KUD PIR-EUN adalah para petani peserta PIR-EUN dan jika memungkinkan berdasarkan kelayakan usaha KUD dapat juga masyarakat sekitar PIR-EUN

HUBUNGAN KELOMPOK TANI SERASI DAN MELEMBAGA DENGAN KUD

1. KUD untuk dan dari petani menuju ke keluarga sejahtera.
2. Kelompok tani mejadi inti kekuatan KUD
3. Seluruh anggota kelompok tani wajib menjadi anggota KUD
4. WKAK sebagai tempat pelayanan koperasi (TPK)
5. Meningkatkan pelayanan KUD kepada anggota

KELEMBAGAAN TANI NELAYAN

Koperasi Unit Desa (KUD)

Agar terjadi hubungan yang melembaga antara kelompok tani dan nelayan dengan KUD, diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Wilayah kerja KUD merupakan kelipatan bulat dari WKPP
- b. Adanya pengurus KUD yang diberi tugas khusus untuk membimbing unit pertanian.
- c. Beberapa kontak tani - nelayan andalan WKPP diarahkan untuk dapat ditunjuk menjadi anggota Badan Pembimbing dan pelindung KUD (BPP-KUD) dan dapat terpilih menjadi BPP-KUD
- d. Ketua kelompok kontak tani tingkat WKPP diarahkan agar berperan aktif sebagai koordinator produksi KUD
- e. Kontak tani/anggota kelompok tani dan KUD dengan bimbingan dan latihan dari aparat penyuluh pertanian/satuan pelaksana Bimas kabupaten meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri untuk dapat menjadi anggota/pengurus KUD dan Badan Pemeriksaan KUD guna memperkuat KUD
- f. RDKK dijadikan sebagai rencana pelayanan KUD yang dituangkan dalam rencana kerja KUD dan rencana Anggaran Pendapatan Belanja KUD.
- g. Mengembangkan kelompok tani menjadi perwakilan/cabang selaku tempat pelayanan koperasi di desa-desa bersangkutan

IX. Pembinaan Ekonomi Lemah dan Koperasi :

Di pedesaan tersebar petani, peternak nelayan pengrajin yang mempunyai klasifikasi usaha lemah dan / atau koperasi yang usahanya lemah.

Dalam rangka membantu usaha lemah dan koperasi, Pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1232/KMK 013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina berupa :

1. Peningkatan kemampuan manajerial
2. Peningkatan kemampuan dalam keterampilan teknik produksi
3. Peningkatan kemampuan modal kerja, antara lain bantuan pengadaan bahan baku dan modal usaha
4. Peningkatan kemampuan pemasaran atau bantuan pemasaran
5. Pemberian jaminan untuk mendapat kredit perbankan

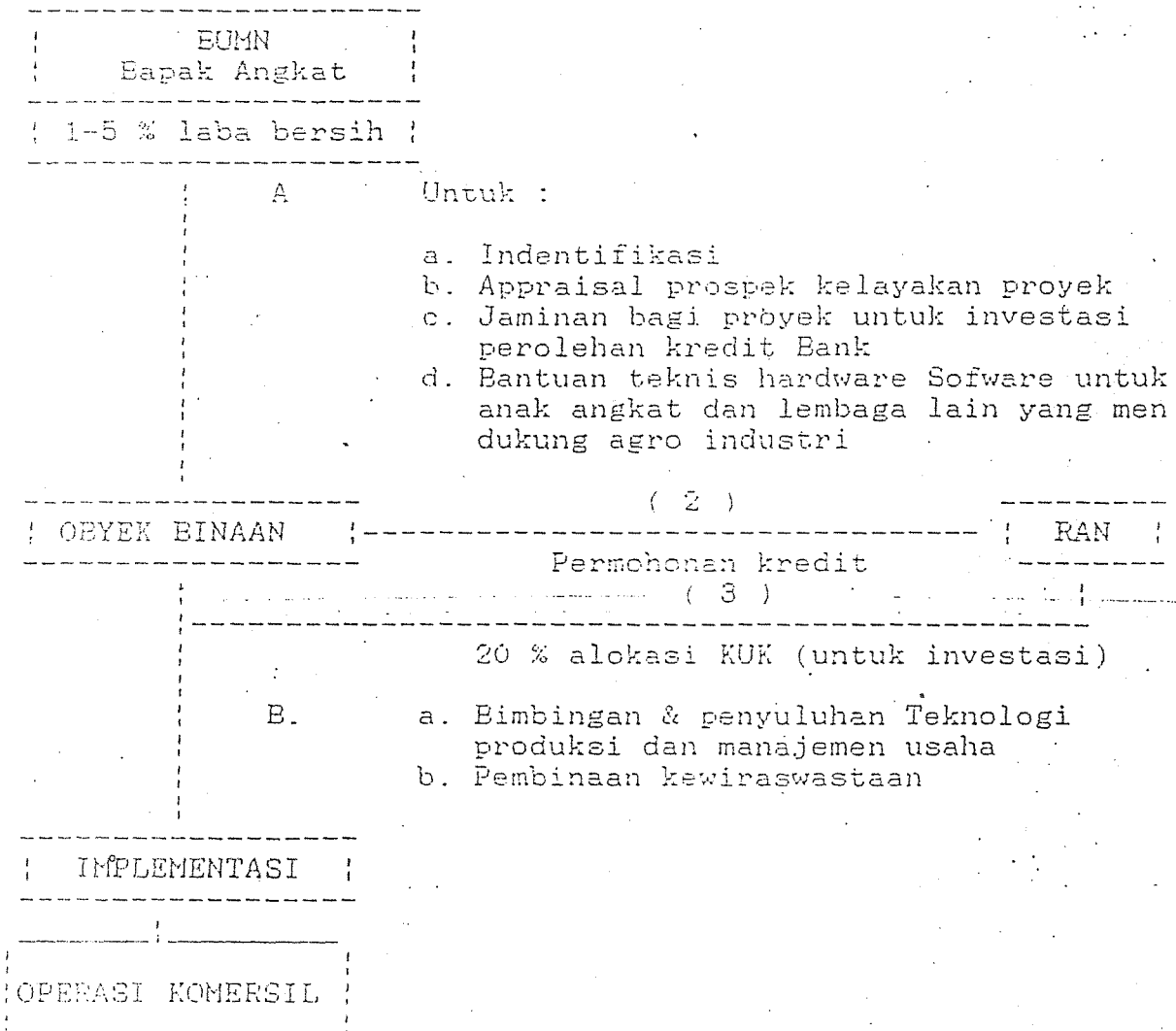
dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan dari bagian laba bersih BUMN, yang besarnya antara 1 s/d sampai dengan 5 % laba bersih :

s/d Rp 10 milyar	:	maximal Rp 100 juta
s/d Rp 20 milyar	:	maximal Rp 200 juta
s/d Rp 30 milyar	:	maximal Rp 300 juta
s/d Rp 40 milyar	:	maximal Rp 400 juta
diatas Rp 40 milyar	:	maximal Rp 500 juta

Agar pemanfaatan dana pembinaan ekonomi lemah dan kope-
rasi tersebut intensif dan efektif serta efisien juga
dihubungkan dengan pemanfaatan Kredit Usaha Kecil
(K.U.K), Pemerintah (Departemen Perindustrian dan
Departemen Pertanian) mengeluarkan skenario :

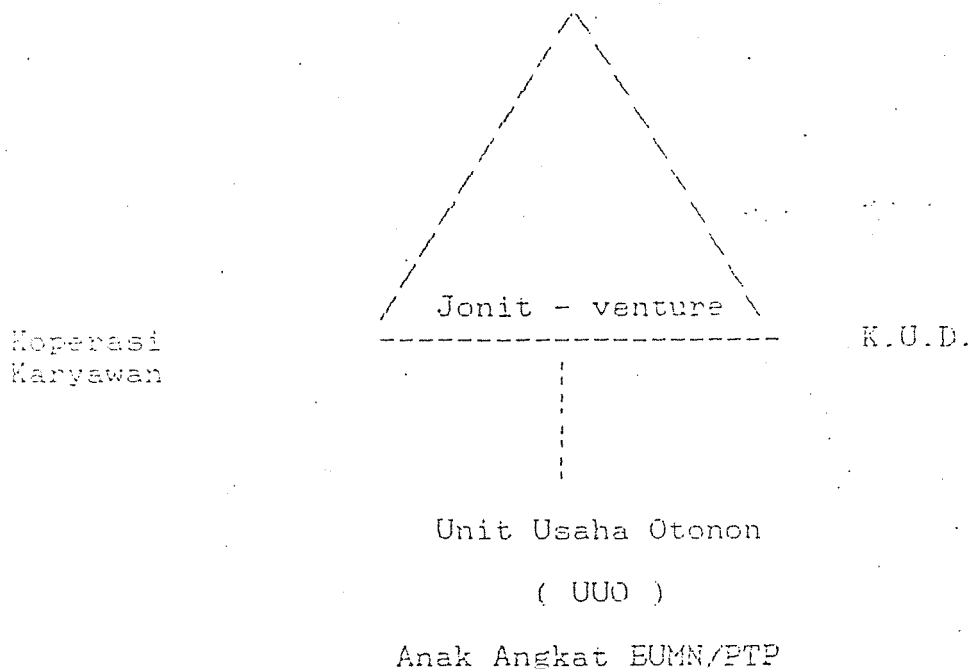
SKENARIO PEMANFAATAN K.U.K. 20 % dan 1-5 %
LABA BERSIH BUMN BAGI PENGEMBANGAN AGRO INDUSTRI



dimana masing-masing Anak Angkat dan Anak angkat , sudah
beroperasi mengikuti prinsip-prinsip usaha yang sehat
dan saling menguntungkan.

Beberapa contoh pelaksanaan bantuan ekonomi lemah dan koperasi :

BANTUAN EKONOMI LEMAH DAN KOPERASI
(SK MENMUDTAN NO.KB.140/194/MM/XII/1989)



- Usaha :
- Pengadaan kebutuhan barang/jasa/Peralatan untuk BUMN/PTP
 - Produksi sejenis di BUMN/PTP (Teh hijau, pucuk dari petani/KUD)
 - Para pengrajin yang berproduksinya dipakai oleh PT.Perkebunan
 - Para petani yang tergabung dalam koperasi yang bahan mentahnya diolah di PTP (contoh petani teh)
 - Koperasi Primer karyawan PT.Perkebunan

A K T I V I T A S

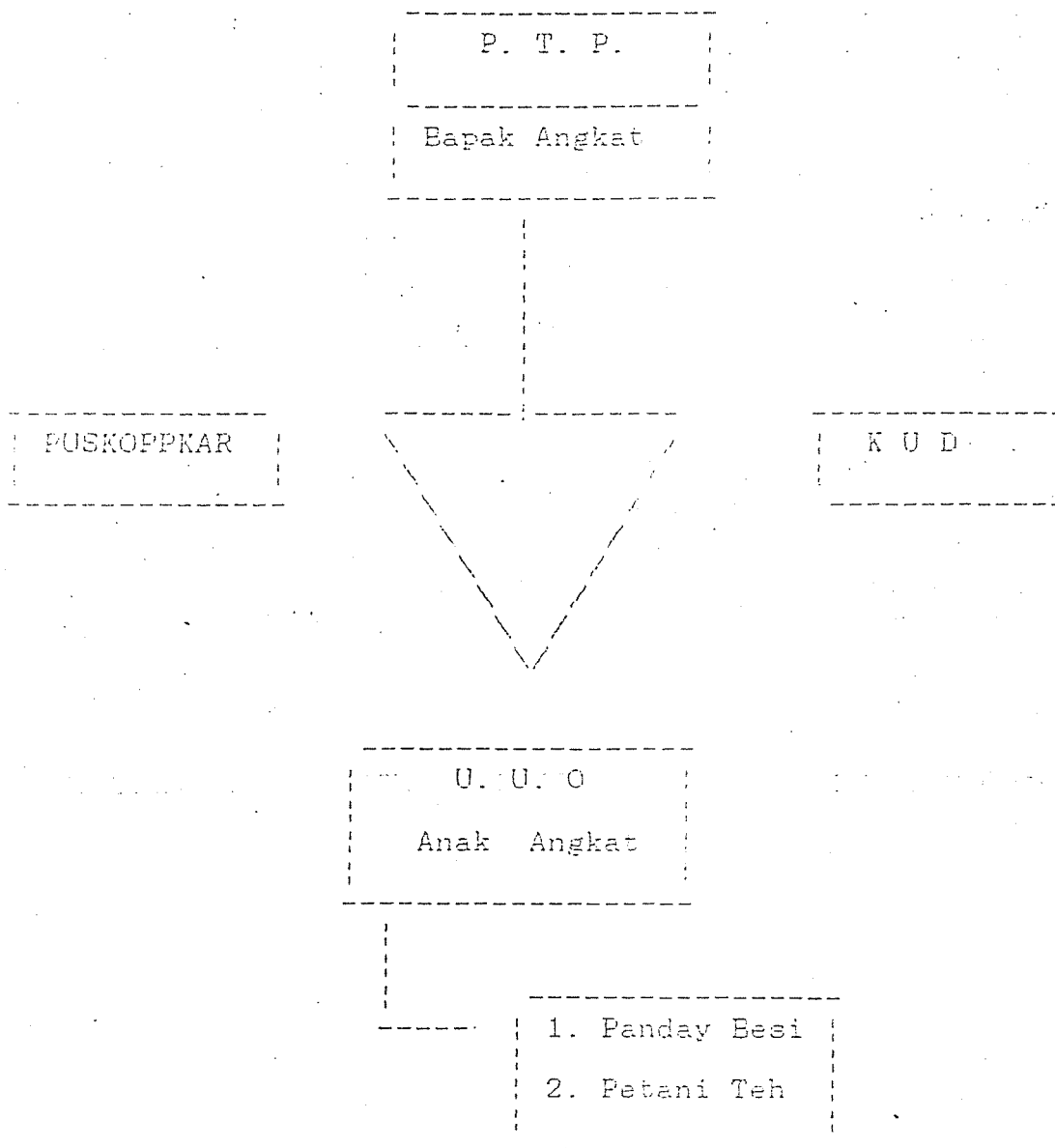
PENGRAJIN PADAI BESI

UNIT TEH RAKYAT

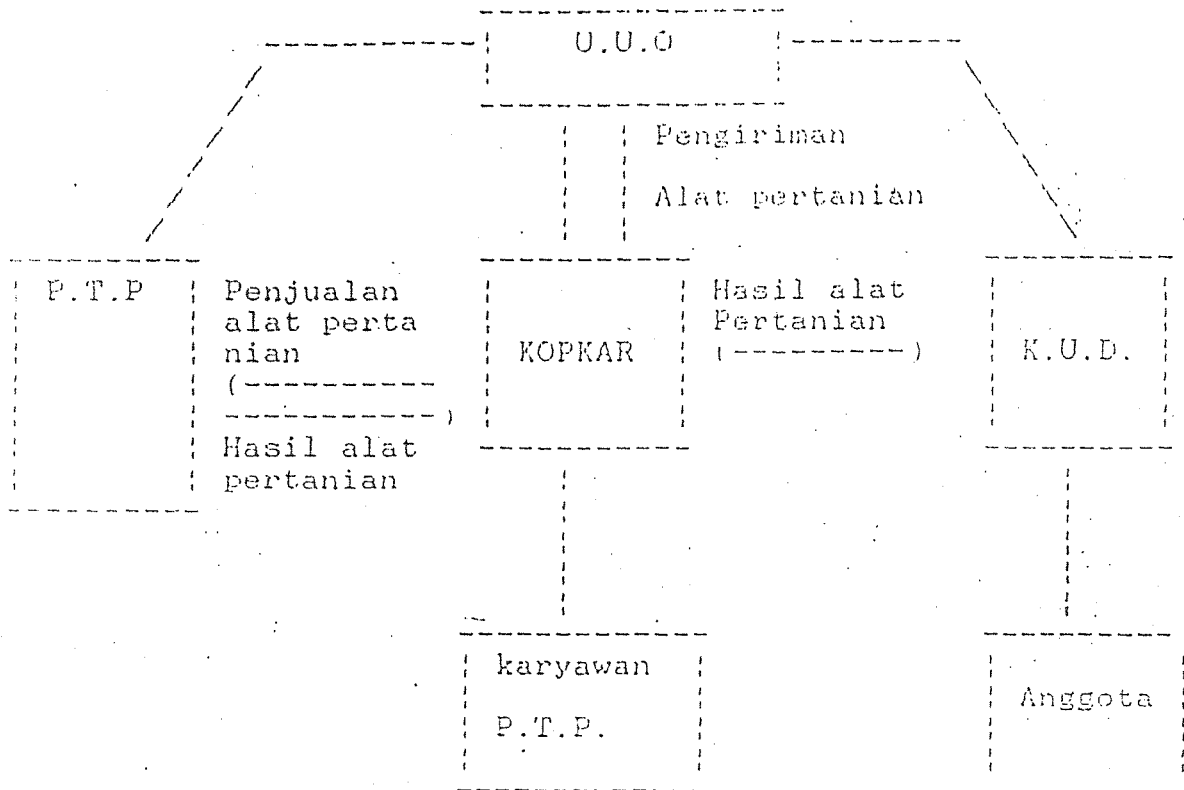
BAHAN BAKU	PTP	PETANI	UOO	PTP
BAHAN PEMBANTU		-TANAH/LAHAN -TANAH -PEMELIHARAAN -PANEN	-PEMBINAAN -PRODUKSI -TRANSPORTASI -ALAT SARANA -PEMASARAN	-MODAL -BIBIT -PEMBINAAN -PROSESING -MEMBANTU PEMASARAN
PROSESING (PENGRAJIN)		POTENSI TEH RAKYAT (UOO)		
		YANG DIGARAP		POTENSI
A. SETENGAH JADI		8 DESA		8-DESA
B. FINISHING TREATMEN		200 ORANG		553 ORANG
C. QUALITY CONTROL		171 ORANG		553 ORANG
		174 ORANG		600 ORANG
		607.453 KG		337.500 K
		373 KG/Ha		1.250 KG/
PEMASARAN		P. T. P.		
U U O		PASAR PESANAN		

PEMBINAAN EKONOMI LEMAH DAN KOPERASI

(Bapak Angkat : Anak Angkat)



PANDAY BESI :



USAHA - TEH :

